

ABSTRAK

Penelitian ini penulis susun berdasarkan kasus yang terjadi antara TNI yang berniat mengamankan jatuhnya pesawat Hawk 200 dan wartawan yang hendak meliput kasus jatuhnya pesawat tersebut dan dari kasus tersebut penulis mengkasi dua rumusan masalah Upaya hukum yang dilakukan oleh wartawan terhadap kasus jatunya pesawat hawk 200 dan Ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan atas jatuhnya pesawat Hawk 200 bernomor registrasi TT 0212 milik TNI AU.

Metode penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan masalah yakni Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian permasalahan yang diangkat penulis di analisis oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara deduktif. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan buku sekunder berupa buku literature, jurnal, makalah dan artikel dari internet

Dari kajian yang penulis lakukan diketahui bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh wartawan terhadap kasus anggota TNI yang melakukan tindakan menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalis dengan cara melakukan penganiayaan, mengadukan permasalahan untuk ditindaklanjuti dalam pemeriksaan perkara pidana atas dasar anggota TNI melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pers dan melaporkan kepada Dewan pers atas dasar telah melakukan tindakan melanggar kemerdekaan pers.

Anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan dalam mencari informasi dapat dikatakan telah melakukan satu perbuatan pidana tetapi melanggar dua peraturan perundang-undangan yaitu melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 351 KUHP dan melanggar ketentuan Pasal 18 UU Pers. Terhadap tindakan anggota TNI tersebut maka kepada pelakunya dikenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU Pers atas dasar aturan yang bersifat umum dalam hal ini Pasal 351 KUHP dikalahkan oleh aturan yang bersifat khusus dalam hal ini Pasal 18 UU Pers yang dikenal dengan asas *lex speciale derogat lex generalis*

Kata kunci : Pers, TNI, Penganiayaan

ABSTRACT

The study authors arrange by cases that took place between TNI who intends to secure the fall Hawk 200 aircraft and journalists wishing to cover the case of the fall of the plane and the case of the author of the mengkasi two formulation problems legal Efforts made by journalists taking action against cases of aircraft hawk 200 to communism and law provisions that can be applied against the TNI members who did the persecution of journalists over the fall Hawk 200 aircraft registration TT 0212 INDONESIAN AIR FORCE property.

The method of writing a thesis is a normative legal research using the method of approach to the problem which is the approach the problem in this thesis using the approach of law (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The problem then was appointed a writer in the analysis by the author using the method of normative legal research is descriptive qualitative analysis done by deductive. Legal materials that are used by the author is the primary legal materials in the form of legislation and secondary books literature books, journals, papers and articles from the internet.

The studies that the authors do note that legal efforts made by journalists taking action against cases of TNI members who perform actions to obstruct journalists in carrying out the task of journalists by the persecution, is suing the problem for actionable in criminal proceedings on the basis of TNI members perform criminal acts as provided for in article 18 of the ACT and to report to the Council's press releases on the ground have done actions violate press freedom.

TNI members who did the persecution of journalists in search of information can be said to have committed a criminal act but two violated regulations that do criminal acts in violation of the provisions of Article 351 of the CRIMINAL CODE and in violation of the provisions of article 18 of LAW Action Against the press. the TNI members to the culprit is subject to provisions set forth in Article 18 of the ACT of the press on the basis of rules which are common in this Article 351 of the CRIMINAL CODE was defeated by a specific rule in this case Article 18 of ACT press release the principle of *lex spesiale derogat lex generalis*

Keywords: press, TNI, persecution